



Mendorong Percepatan Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat Melalui Sistem Informasi



WORLD AGROFORESTRY (ICRAF)



Perhutanan Sosial Sebagai Skema Akses Legal Pemanfaatan Lahan untuk Masyarakat di Sekitar Hutan



Persetujuan Pengelolaan **Perhutanan Sosial** memberikan akses legal **Pemanfaatan Hutan** yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial



Model **pendekatan mutakhir** dalam **pengelolaan hutan** yang mampu **mengatasi sejumlah persoalan, seperti kemiskinan, perbaikan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, serta persoalan terkait dinamika sosial budaya lainnya**

Permen LHK No.9 Tahun 2021



Program **Perhutanan Sosial** adalah bagian dari **solusi** untuk **mengatasi masalah tenurial** dan memberikan lebih banyak akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan dan **mengurangi kemiskinan.**

Strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim (LTS-LCCR, 2021)

Implementasi Perhutanan Sosial Masih Menghadapi Berbagai Tantangan dan Hambatan



Kapasitas dan informasi
Masyarakat yang masih terbatas dalam memulai aktivitas perhutanan sosial dan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan perizinan Perhutanan Sosial.



Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan lahan serta mengintegrasikannya dalam perencanaan



Kelompok masyarakat yang saat ini telah memiliki izin perhutanan sosial juga masih membutuhkan pendampingan dalam menjalankan kegiatan usaha perhutanan sosial.



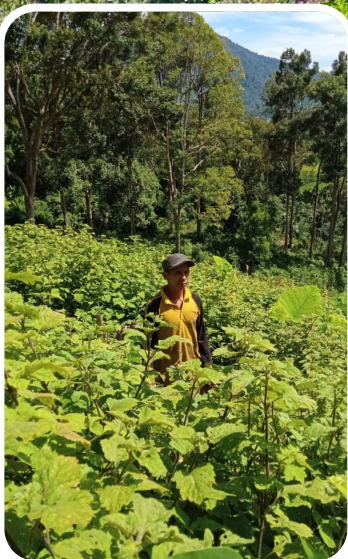
Keterbatasan sumber daya pendamping memerlukan investasi, SDM, dan infrastruktur yang memadai guna melakukan pendampingan kepada penerima izin.

Berbagai keterbatasan ini memengaruhi percepatan implementasi perhutanan sosial. Ketersediaan teknologi informasi sangat potensial untuk membantu pemecahan permasalahan ini, sekaligus mengatasi tantangan dan hambatan yang ada

Latar Belakang



© World Agroforestry (ICRAF)



© World Agroforestry (ICRAF)

Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Percepatan Perhutanan Sosial adalah kerangka kerja sistem informasi yang dibangun untuk mendukung diseminasi pengetahuan dan informasi yang akan meningkatkan kapasitas petani dan/atau masyarakat dalam mengelola bentang lahannya melalui kemudahan akses informasi perhutanan sosial

Kerangka kerja ini dibangun dengan mempertimbangkan:



Terbangunnya **Platform Sistem Informasi** yang tepat guna



Tersusunnya **Protokol dan guidelines**



Penguatan dan Keterlibatan **para pihak**

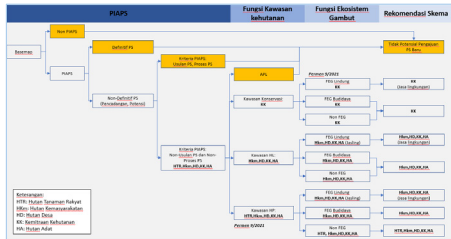
Kerangka kerja sistem informasi yang dibangun untuk mendukung diseminasi pengetahuan dan informasi yang akan meningkatkan kapasitas petani dan/atau masyarakat sekitar hutan dalam mengelola bentang lahan melalui kemudahan akses informasi perhutanan sosial



Modul 1: Rekomendasi Skema PS

Analisis spasial

Membantu menganalisis variabel penentu rekomendasi skema PS yang mudah ditunjukkan secara keruangan



Menyajikan Ringkasan area indikatif potensial rekomendasi pengajuan skema PS yang sesuai pada suatu lokasi

Penapisan kriteria

Membantu analisis variabel penentu rekomendasi skema berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait pemilihan skema PS

Penelaahan regulasi dan peraturan perundangan

Identifikasi kriteria setiap skema PS berdasarkan regulasi

Analisis kombinasi kriteria yang mewakili setiap skema PS

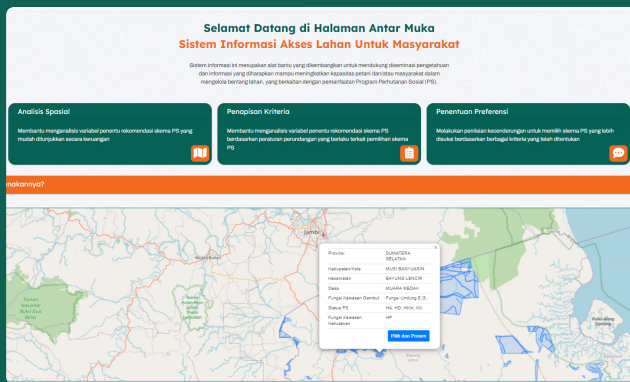
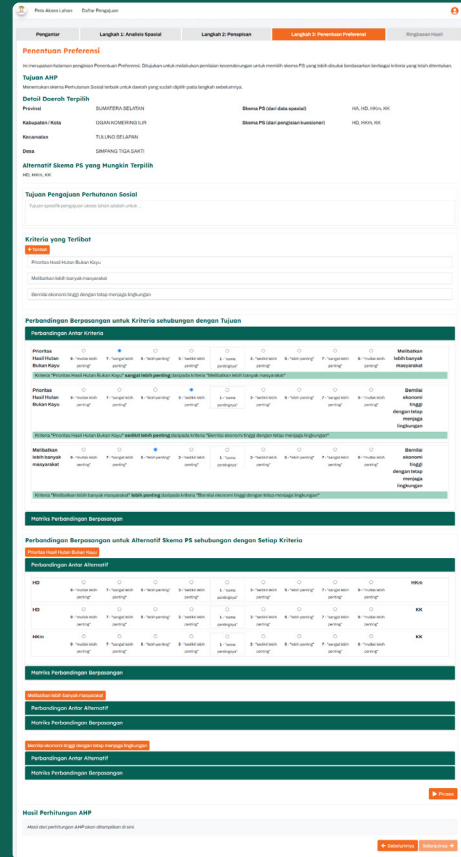
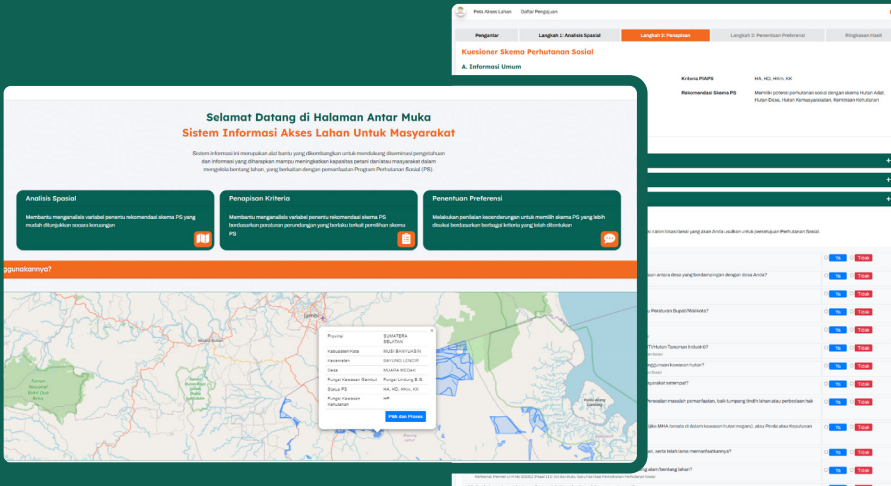
Penapisan setiap skema PS yang memenuhi kriteria pada suatu kondisi menggunakan daftar pertanyaan yang disajikan dalam kuisioner

Penentuan Preferensi

Membantu melakukan penilaian kecenderungan untuk memilih skema PS yang lebih disukai pengguna berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan berdasarkan kondisi eksisting

Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk membantu menentukan pengambilan keputusan dengan lebih mudah terhadap berbagai pilihan terkait skema akses legal pemanfaatan lahan melalui program perhutanan sosial dan menentukan salah satu yang paling sesuai







Modul 2: Prasyarat Pengajuan PS

Pendampingan dan konsultasi

Memfasilitasi diskusi dan konsultasi antara Masyarakat hutan calon pengaju PS dengan para pihak

Pengisian form persyaratan

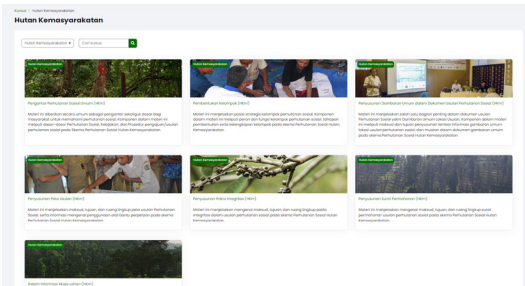
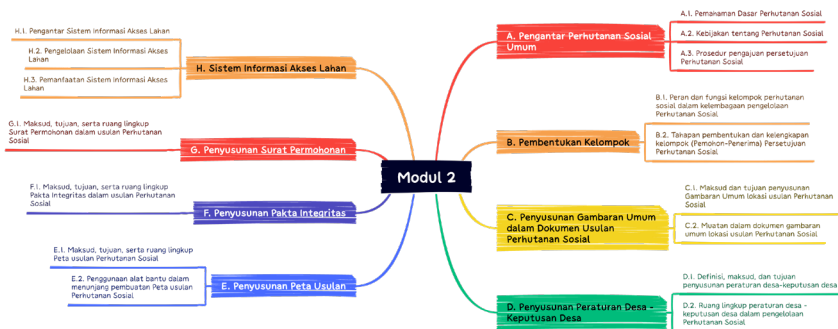
Mendukung penyiapan dokumen persyaratan pengajuan skema PS

Pembelajaran mandiri

Menyediakan berbagai materi pembelajaran secara daring yang dapat dipelajari secara mandiri oleh kelompok masyarakat

Validasi Awal

Memfasilitasi diskusi dua arah antara calon pengusul dan instansi yang berwenang dalam menilai persyaratan awal yang telah disiapkan



Training of Trainer SiAlam kepada Pemangku Kepentingan



Workshop bersama representasi kelompok masyarakat



ps.lahanuntukkehidupan.id



Kemudahan akses informasi:

SiAlam memungkinkan **komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemangku kebijakan**. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi tentang persyaratan yang kurang jelas. Dengan demikian, masyarakat mendapat penjelasan yang akurat dan mengurangi kesalahpahaman dalam melengkapi dokumen persyaratan.

Peningkatan Pengetahuan:

SiAlam berupaya mendukung proses **diseminasi informasi dan pengetahuan** untuk Masyarakat calon pengaju PS dalam memenuhi persyaratan permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial

Pendampingan virtual:

SiAlam sebagai alternatif sarana untuk mendukung para pihak dalam melakukan pendampingan secara virtual kepada penerima izin melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengajuan skema perhutanan sosial



Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia

Tel: +(62) 251 8625415; www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

Informasi lebih lanjut: Harry Aksomo (h.aksomo@cifor-icraf.org), Feri Johana (f.johana@cifor-icraf.org)

